



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT**

**RDPD PANJA PETA JALAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

- Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa Sidang ke- : III (Tiga)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPD)  
Dengan : 1. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).  
2. Ketua Umum Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP).  
3. Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI).  
4. Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).  
5. Bendahara Umum Perkumpulan Orangtua Anak Disabilitas Indonesia (PORTADIN).  
6. Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HPPKI).  
7. Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (ASAH PENA).
- Hari/Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021  
Pukul : 10.00 – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
- Pimpinan Rapat : Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI  
Agenda acara : 1. Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI;  
2. Pandangan, Kritik, dan Saran terhadap Peta Jalan Pendidikan dalam perspektif Pendidikan Informal/Non Formal dan Disabilitas.
- Hadir Komisi X DPR RI : 25 orang dari 31 orang Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.
- Hadir Narasumber : 1. **Prof. Dr.Unifah Rosyidi, M.Pd** (Ketua Umum PGRI).  
2. **Drs. H. Ali Badarudin, S.H., M.M.** (Ketua Umum Forum PLKP).  
3. **Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati. M.Si.** (Ketua Umum HIMPAUDI).  
4. **Drs. Gufron Sakaril, M.M.** (Ketua Umum PPDI).  
5. **Nurhidayati Polaningtyas** (Bendahara Umum PORTADIN).  
6. **Drs. H. Asep Syarifudin, M.Si.** (Ketua Umum HPPKI).  
7. **Anastasia Rima H.** (Sekretaris Jenderal ASAH PENA)

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.

Rapat diawali dengan Pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (PORTADIN), Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HPPKI), dan Asosisasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (ASAH PENA) serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- A. Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (PORTADIN), Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HPPKI), dan Asosisasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (ASAH PENA) yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia (*bahan terlampir*), antara lain:
1. PGRI menyampaikan apresiasi atas disusunnya Peta Jalan Pendidikan oleh Kemendikbud RI, namun secara umum penyusunan Peta Jalan Pendidikan belum memuat latar belakang pemikiran yang jelas, cara berpikir filosofis, historis, dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Empat persoalan pendidikan yaitu akses, mutu, relevansi dan tata kelola tidak menjadi pijakan Peta Jalan Pendidikan, sehingga progam dan kegiatan yang disusun dalam Peta Jalan Pendidikan sulit dicapai efisiensi dan efektivitasnya.
  2. Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) menyampaikan bahwa Peta Jalan Pendidikan diperlukan untuk memastikan pembinaan Pendidikan yang terarah dan berkesinambungan serta dapat mereformasi Pendidikan, sehingga diperlukan kontribusi pemikiran dari semua pemangku kepentingan pendidikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Peta Jalan Pendidikan belum mengakomodir Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional serta belum terlihat perencanaan anggarannya.

3. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) menyampaikan apresiasi terhadap Kemendikbud RI yang telah menyiapkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dengan sangat detail dengan orientasi ke depan dengan pendekatan global. Namun Peta Jalan Pendidikan harus mendudukan terminologi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pra Sekolah. Kesalahan persepsi ini akan berakibat kebijakan yang akan diambil dalam Peta Jalan Pendidikan tidak tepat. PAUD meliputi aspek skolastik dan Non Skolastik guna persiapan pendidikan lebih lanjut bahkan pondasi kualitas SDM dengan pengembangan utuh jasmani dan rohani.
4. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyampaikan bahwa secara umum, Peta Jalan Pendidikan Kemendikbud RI sudah memadai. Namun PPDI berpendapat bahwa Peta Jalan Pendidikan belum mencerminkan pola koordinasi dan langkah kebijakan yang memaksa Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan untuk merealisasikan Pendidikan Inklusi serta perlunya Kabupaten/Kota memiliki Peraturan Daerah yang mengatur Pendidikan Inklusif.
5. Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (PORTADIN) menyampaikan apresiasi terhadap hadirnya Peta Jalan Pendidikan Indonesia Kemendikbud RI 2020-2035. Namun Peta Jalan Pendidikan dimaksud, belum mengakomodir Pendidikan Khusus dan Inklusi. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Inklusi dalam Peta Jalan Pendidikan harus disusun berbasis karakteristik dan *stereotype* peserta didik penyandang disabilitas. Sehingga penyelenggaraannya harus bersifat individualistis dan tidak perlu dipaksakan untuk mengikuti program yang homogen.
6. Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HPPKI) menyampaikan bahwa Peta Jalan Pendidikan belum mencerminkan adanya pola pembinaan penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal, perlu peran berbagai pihak antara lain:
  - a. Pembinaan Program Pendidikan Non Formal agar melibatkan tokoh masyarakat, pelaku industri, instansi terkait dan *stakeholder* Pendidikan
  - b. Pembinaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk penyerapan tenaga kerja
  - c. Pembinaan Pembelajaran Pendidikan Non Formal menggunakan strategi manajemen PDCA (*Plan, Do, Check and Action*).
7. Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (ASAH PENA) menyampaikan bahwa Peta Jalan yang disusun tidak berdasarkan kebijakan pendidikan yang ada sebelumnya. Peta Jalan Pendidikan tidak menyebutkan sama sekali jalur Pendidikan Non Formal yang sejatinya telah mengimplementasikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020. Peta Jalan Pendidikan seharusnya mengakomodir ketiga jalur pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan Non Formal diperlukan karena Pendidikan

Formal yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Pendidikan Non Formal merupakan pilihan atas dasar kebutuhan dan keunikan peserta didik.

- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendesak Kemendikbud RI untuk membuat Peta Jalan Pendidikan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam alenia keempat Pembukaan, Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI 1945.
  2. Mendesak Kemendikbud RI untuk segera melengkapi dokumen Peta Jalan Pendidikan dengan naskah akademik agar konsep pembangunan pendidikan dalam Peta Jalan Pendidikan tidak multitafsir.
  3. Mendesak Kemendikbud RI membuat kebijakan yang terakselerasi antara Peta Jalan Pendidikan dan revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional mengingat Peta Jalan dalam sistem pendidikan menjadi substansi penting dalam sistem pendidikan nasional.
  4. Mendesak Kemendikbud RI untuk melibatkan banyak komponen masyarakat dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan, khususnya untuk Lembaga non formal/informal, dan Pendidikan inklusi, terutama Pendidikan PAUD serta penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Informal/NonFormal sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

## I. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.10 WIB

**KETUA RAPAT,**



**Syaiful Huda** 